



PUTUSAN

Nomor 4506/Pdt.G/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Bogor/25 Maret 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxx, Kota Bogor, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2020 menguaskan kepada MAI INDRADY, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "MAI INDRADY, SH. ASSOCIATES" Advocates & Legal Consultants, yang beralamat dan berkantor di Villa Mutiara Gading 3 Blok O5/52, Bekasi Utara, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Bekasi/12 Maret 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 4506/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara Nomor 4506/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 21 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan menikah secara Islam pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sebagaimana ternyata dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 03 Juli 2020 yang dikutip sesuai dengan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 01 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;
2. Bahwa pada masa-masa awal perkawinan, suasana dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis serta dilandasi oleh rasa kasih sayang dan cinta;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon memilih tempat tinggal bersama di xxx, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :
 - Anak, lahir 14 Juli 2015 (Almarhumah);
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terganggu dari bulan Agustus 2019, hampir setiap hari terjadi perselisihan dan pertengkaran demi pertengkaran secara terus menerus didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak bisa diatasi sampai saat ini, yang disebabkan antara lain :
 - Bahwa Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon dan Termohon melarang Pemohon untuk bertemu dengan keluarga Pemohon termasuk dengan orang tua Pemohon, begitu juga Termohon selalu cemburu apa bila Pemohon bertemu dengan keponakan-keponakan Pemohon;
 - Bahwa Termohon tidak menghargai, tidak menghormati serta tidak sopan sekali terhadap Pemohon dan apabila terjadi perselisihan dengan Pemohon, Termohon selalu mengucapkan kata-kata "kita pisah aja" dan itu sudah sering diucapkan Termohon kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 4506/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan September Tahun 2019, dimana Termohon melakukan suatu tindakan yang tidak terpuji sebagai seorang istri, antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa Termohon melakukan suatu tindakan yang tidak terpuji dengan menggantung semua pakaian Pemohon dan melemparkannya kehalaman rumah dan selanjutnya mengusir Pemohon tanpa memperbolehkan membawa satu pakaian, kecuali yang dipakai oleh Pemohon pada saat itu;
 - Bahwa yang sangat menyakitkan sekali bagi Pemohon adalah Termohon mencakar muka dan mematahkan ID Card Pemohon sebagai Karyawan salah satu Perusahaan Swasta;
 - Bahwa setelah Pemohon diusir oleh Termohon, Pemohon tinggal bersama orang tuanya Jalan xxx Kota Bogor;
 - Bahwa orang tua Pemohon sudah berusaha dan berupaya untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi niat baik dari orang tua Pemohon ditolak mentah-mentah oleh Termohon dan orang tua Termohon;
 - Bahwa tepatnya pada tanggal 22 September 2019 orang tua Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengucapkan Talaq yang disaksikan oleh keluarga Termohon dan adik kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Kota Bogor tidak pernah datang dan bertemu dengan Termohon begitu juga sebaliknya dan Termohon sudah menjual semua perabotan rumah tangga yang ada dan didapat selama masa perkawinan dan meninggalkan begitu saja satu bangunan rumah yang terletak di xxx, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat tanpa memberi tahu Pemohon;
 - Bahwa setelah kejadian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Termohon pergi bersama orang tua Termohon tanpa pamit dan izin dari Pemohon dan sampai saat Permohonan ini diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Cibinong tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah memberi kabar berita dan/atau

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 4506/Pdt.G/2020/PA.Cbn



komunikasi dengan Pemohon, karena semua alat komunikasi seperti Handphone Pemohon diblokir oleh Termohon sebagaimana terlampir Surat Keterangan Ghoib Nomor : 474.2/09/PKM, tertanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

6. Bahwa atas tindakan dan tingkah laku serta perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sebagai seorang Suami sekaligus sebagai Kepala Rumah Tangga sudah tidak dihargai lagi dan telah diinjak-injak martabat serta harga dirinya oleh Termohon dan Pemohon merasa tidak ada lagi kecocokan, kerukunan & keharmonisan didalam menjalankan bahtera rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah & Warrohmah dengan Termohon;

7. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga, serta tidak sanggup lagi melanjutkan hidup bersama dengan Termohon. Maka oleh karena itu, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon (Pemohon) di Pengadilan Agama Cibinong;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf "f" maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/1995, tertanggal 26 Maret 1997 alasan-alasan perceraian sudah terpenuhi, maka dengan demikian Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo sudilah kiranya bersedia memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir pada hari persidangan yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo dan selanjutnya memberikan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 4506/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 03 Juli 2020 yang dikutip sesuai dengan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 01 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Gede, Bekasi;

3. Menetapkan dan menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk Ikrar Menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Cibinong;

4. Menyatakan hubungan perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sebagaimana ternyata dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 03 Juli 2020 yang dikutip sesuai dengan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 01 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Gede, Bekasi putus karena perceraian setelah Ikrar Talak Satu Raj'i diucapkan;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama (KUA) tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

6. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo berpendapat lain "Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)";

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil melalui pengumuman Radio Teman 93 FM Tegar Beriman dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 4506/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan tersebut dimana Pemohon tetap pada permohonannya dengan mencabut petitum nomor 2, 4 dan 5 dicabut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Nomor xxx Tanggal 03 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxx atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 07-08-2020 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib nomor xxx tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi I, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah adik Ipar Pemohon;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 4506/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun kemudian rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar, saksi beberapa kali melihat pertengkarannya namun tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak September 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi dan Pemohon telah mencari Termohon namun tidak ditemukan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
2. Saksi II, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak agustus 2019 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon suka marah-marah dan melarang Pemohon bertemu dengan keluarga Pemohon, saksi beberapa kali melihat pertengkarannya;
 - Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak September 2019;
 - Bahwa keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi dan Pemohon telah mencari Termohon namun tidak ditemukan;

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 4506/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 di tambah keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Pemohon maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon yang beragama Islam dan Termohon adalah suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 01 Juni 2014, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan perkara Cerai Talak dan perkara cerai talak itu adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon telah diajukan oleh Suami sebagai Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal Isteri (Termohon). Oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *aquo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan, alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 dan secara Materil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkara *aquo* oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti P.3 akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan Tergugat telah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia telah dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan dan alat bukti P.3 oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah tidak diketahui lagi alamat dengan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib) maka pemanggilan kepada Tergugat melalui siaran radio;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Termohon sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 4506/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara *aquo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah sesuai menurut Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon melarang Pemohon bertemu dengan keluarga Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak September 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat permohonan Pemohon, Keterangan Pemohon di persidangan dan dari keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 4506/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan tergugat suka marah marah dan melarang Pemohon bertemu dengan keluarga dan Termohon cemburu bila Pemohon ketemu keponakan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah sejak September .2019;
- Bahwa keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi dan Pemohon telah mencari Termohon namun tidak ditemukan;
- Bahwa, kedua orang saksi Pemohon sudah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalkannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap

Halaman **11** dari **14**, Putusan Nomor 4506/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya *"Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;
2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya *"Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2, 4 dan 5 telah dicabut oleh Pemohon maka tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 4506/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 430000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat Farid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Drs. H. Abid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Drs. H. Abid, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 4506/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	310.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>16.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	430.000,-

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);